



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PEMANTAUAN KEWASPADAAN DINI**

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
KECAMATAN BANDUNGAN**

**JL. P. Diponegoro Km 0,5 Telp (0298) 711585 Fax(0298) 711877, BANDUNGAN – 50665**



DHARMOTAMMA SATYA PRAJA

**PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG  
KECAMATAN BANDUNGAN  
JL. P. Diponegoro Km 0,5 Telp (0298) 711585 Fax(0298)  
711877, BANDUNGAN – 50665**

Nomor SOP	KEC_BANDUNGAN/TRANTIBUM/02
Tanggal Pembuatan	19 Juni 2019
Tanggal Revisi	- -
Tanggal Efektif	19 Agustus 2019
Disahkan Oleh	KAMAT BANDUNGAN  EKO PURWANTO, S.Sos Pembina Tk.I NIP 197006051990031013
Nama SOP	Pemantauan Kewaspadaan Dini

**Dasar Hukum :**


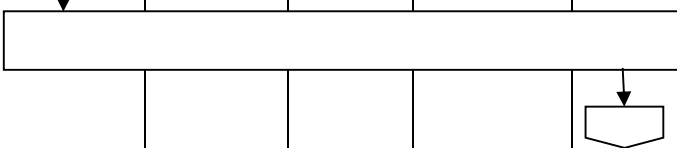

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
3. PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP)
4. Inpres Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri
5. Peraturan Dalam negeri Nomor 12 tahun 2006 tentang kewaspadaan dini masyarakat di daerah

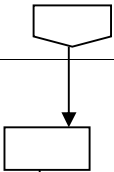
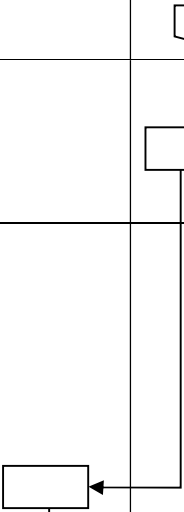
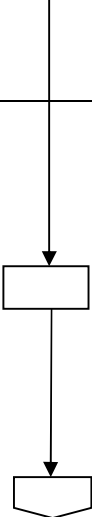
**Kualifikasi Pelaksana :**

1. Pendidikan minimal SMA/ sederajat
2. Memiliki Pengetahuan tentang kewaspadaan dini dan wawasan kebangsaan
3. Mampu berkomunikasi dengan baik

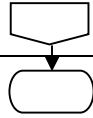
<b>Keterkaitan :</b>	<b>Peralatan/Perlengkapan :</b>
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ATK</li> <li>2. Komputer</li> <li>3. Printer</li> <li>4. Camera</li> </ol>
<b>Peringatan</b>	<b>Pencatatan dan Pendataan</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terlaksanya pemantauan Kewaspadaan dini akan tercipta kondisi sosial, hukum yang kondusif dan keamanan dalam negeri untuk mendukung berkehidupan berbangsa dan bernegara yang baik</li> <li>2. Potensi dan indikasi timbulnya ancaman gangguan keamanan dan bencana antara lain: isu sara (suku, ras, etnis dll)</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SK Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) tingkat kecamatan dan kelurahan</li> <li>2. Tugas Dewan Penasehat dan Pengurus</li> <li>3. Data paham radikal, potensi konflik dan keyakinan baru dll</li> <li>4. BAP</li> </ol>

**PROSEDUR PEMANTAUAN KEWASPADAAN DINI**

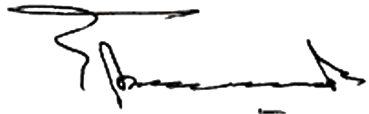
No.	Uraian Prosedur	Pelaksana					Mutu Baku			Ket
		Camat	Sekcam	Kasie	Pengurus	Dewan Penasehat	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Membentuk forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) tingkat kecamatan dan kelurahan						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mempunyai predikat sebagai tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh ormas, tokoh agama, tokoh adat, berkedudukan di lembaga sosial/ lembaga pendidikan</li> <li>- Taat pada pancasila, UUD dan setia NKRI</li> </ul>	1 minggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Forum kewaspadaan dini masyarakat (FKDM) tingkat kecamatan dan kelurahan</li> </ul>	
2.	Mengadakan koordinasi FKDM						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas FKDM meliputi Dewan Penasehat dan Pengurus</li> </ul>	1 minggu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tugas Dewan Penasehat dan Pengurus FKDM</li> </ul>	

										
3.	Sosialisasi tugas kepada pengurus FKDM tingkat kecamatan/kelurahan						Tugas pengurus FKDM	3 hari	Tugas pengurus FKDM	
4.	Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan menginformasikan segala bentuk potensi ancaman keamanan dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara dini						<ul style="list-style-type: none"> <li>- Paham radikal</li> <li>- Potensi konflik</li> <li>- Keyakinan baru dll</li> </ul>	1 bulan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Data paham radikal,</li> <li>- potensi konflik dan keyakinan baru dll</li> </ul>	
5.	Merekomendasikan hasil Menjaring, menampung, mengkoordinasikan dan menginformasikan segala bentuk potensi ancaman kemammana dalam rangka upaya pencegahan dan penanggulangan secara diri kepada dewan penasehat							2 hari		

6.	Menindaklanjuti data yang diterima dari pengurus dengan cara pendekatan, investigasi, verifikasi dll						BAP	3 hari	BAP	
7.	Menetapkan kebijakan						- Apabila perlu proses yang lebih lanjut maka akan dilakukan kerjasama dengan pihak terkait	2 hari	Kebijakan	
8.	Melaporkan kebijakan kepada Bupati dan pengurus FKDM Kabupaten,						- Lisan/tertulis	1 hari	- Lisan/ tertulis - BAP	
							-		-	

										
9.	Mengarsip BAP					BAP	1 jam	BAP		

Diperiksa oleh :  
Camat Bandungan



EKO PURWANTO, S.Sos  
NIP 197006051990031013

BANDUNGAN, 19 Agustus 2019

Dibuat oleh :  
Kasi Trantibum



ANTON KARUNIA, SH  
NIP 198303272010011025